

POAC PLUS SEBAGAI SOLUSI PERMASALAHAN MANAJEMEN BK DI SEKOLAH

¹Fuad Mimhamimdala, ²Riska Ahmad, ³Yarmis Syukur

^{1,2,3} Universitas Negeri Padang-Indonesia
mimhamimdala fuad@gmail.com

Abstract: *Guidance and Counseling has an important role in developing the potential, achieving developmental tasks and independence of students, but in realizing this important role it is not uncommon to face various difficulties and challenges due to ineffective and efficient management. Through the application of POAC Plus in counseling guidance management, good planning, efficient organization, proper implementation, careful supervision, regular evaluation and follow-up can produce quality counseling guidance services. The writing method used in the article is the literature study method with the aim of obtaining comprehensive data on the subject or problem being studied by reviewing related literature, the result of this discussion is POAC Plus management as a solution in alleviating managerial problems that arise and improving the quality of guidance and counseling services in schools.*

Keywords: *POAC Plus, Management, Guidance and Counseling*

Abstrak: Bimbingan dan Konseling memiliki peran penting dalam pengembangan potensi, pencapaian tugas perkembangan serta kemandirian peserta didik, namun dalam mewujudkan peran penting ini tidak jarang menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hal ini dikarenakan pengelolaan yang kurang efektif dan efisien. Tujuannya ialah melalui penerapan POAC Plus dalam manajemen bimbingan konseling akan diperoleh perencanaan yang baik, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, pengawasan yang cermat, evaluasi yang teratur serta tindak lanjut dapat menghasilkan pelayanan bimbingan konseling yang berkualitas. Metode penulisan yang digunakan dalam artikel ialah metode studi literatur dengan tujuan memperoleh data yang komprehensif mengenai objek atau permasalahan yang sedang diteliti dengan mengkaji literatur terkait, hasil dari pembahasan ini ialah manajemen POAC Plus sebagai solusi dalam mengentaskan permasalahan manajerial yang muncul serta meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Kata kunci: POAC Plus, Manajemen, Bimbingan dan Konseling

PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling (BK) di sekolah merupakan komponen yang sangat menentukan dalam perkembangan peserta didik secara holistik. Sebagai mana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah yang kesimpulannya yaitu BK

merupakan upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilaksanakan oleh guru BK/konselor agar peserta didik dapat mencapai kemandirian hidup dan terfasilitasi untuk perkembangannya. Menurut Syukur dkk., (2019) dijelaskan bahwa tujuan memberikan layanan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu mencapai potensi serta

mengatasi tantangan yang individu tersebut hadapi. Untuk mencapai tujuan ini, individu harus menyadari, memahami, dan mengidentifikasi kemampuan dan lingkungannya, menetapkan tujuan, serta merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Sekolah menawarkan layanan BK yang terintegrasi ke dalam sistem pendidikan untuk membantu siswa dalam perjalanan pengembangan diri mereka. Pengelolaan BK dilakukan dengan cermat untuk memenuhi tujuan sekolah dalam menciptakan lulusan yang berkualitas (Dewany dkk., 2022).

Dalam rangka mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, Griffin (dalam Pratama, 2020) menjelaskan manajemen ialah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengaturan sumber daya.

Efektif yaitu kemampuan untuk melaksanakan kegiatan secara akurat, terorganisir, dan tepat waktu, sedangkan efisien adalah kemampuan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana.

Menurut Fitriyani & Herdi (2019) dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan bimbingan dan konseling pada khususnya, manajemen bimbingan dan konseling digambarkan sebagai aktivitas guna mengintegrasikan seluruh sumber daya bimbingan dan konseling.

Berbagai masalah dalam manajemen bimbingan dan konseling diantaranya ialah tidak adanya perencanaan yang terorganisir dan tepat dalam pembuatan program bimbingan dan

konseling yang mana tanpa persiapan yang tepat, program tersebut dapat kehilangan tujuan dan arah yang jelas, yaitu melayani kebutuhan siswa. Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling juga terkendala akibat pengorganisasian yang buruk diantaranya peran dan tanggung jawab yang tidak konsisten, kurangnya koordinasi antara tim bimbingan dan konseling dan personil lainnya di sekolah seperti dipaparkan oleh Prayitno (2021) bahwa pelayanan BK bukanlah proses yang terpisah dan terisolasi, namun proses yang bekerja mandiri dengan memanfaatkan aspek-aspek budaya, sosial dan lingkungan. Sejalan dengan itu Sari dkk., (2021) menyebutkan bahwa pelaksanaan BK di sekolah ialah proses yang integral antara BK dan personil lainnya. hal ini tidak jarang terjadi permasalahan karena struktur organisasi yang tidak jelas.

Dalam hal implementasi program juga sulit terlaksana karena BK tidak bekerja sendiri melainkan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti guru mata pelajaran, wali kelas, unsur pimpinan, staf, siswa, orang tua dan masyarakat dan terakhir kontrol dan penilaian serta tindak lanjut terhadap kualitas layanan BK merupakan hal penting namun sering diabaikan, tidak adanya mekanisme yang terstandar dengan baik.

Untuk menjamin bahwa siswa menerima layanan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhannya, sangat penting untuk mengatasi masalah dalam manajemen bimbingan dan konseling ini melalui penerapan POAC Plus. Dengan POAC Plus BK di sekolah dapat

membuat perencanaan yang terstruktur sebagaimana disebutkan perencanaan diperlukan karena dalam rangka sinkronisasi program yang sesuai dengan kebutuhan siswa maka dibutuhkan manajemen untuk tercapainya tujuan secara yang efektif dan efisien. Rahman dkk., (2018) menyatakan dengan perencanaan yang baik kemudian mengatur sumber daya secara efisien, mengimplementasikan program dengan benar, mengelola pelaksanaan program, dan secara rutin menilai pencapaian program dengan menggunakan kerangka kerja POAC Plus. Sebagai hasilnya, manajemen POAC Plus dapat menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan masalah manajemen bimbingan dan konseling di sekolah.

Kemampuan manajerial yang baik diperlukan untuk program bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien, dan kemampuan manajerial adalah salah satu kualitas yang harus dimiliki oleh seorang konselor/guru BK, hal ini didasarkan pada Permendiknas No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Dengan pengelolaan manajemen yang terarah dan profesional baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, maka sekolah akan menghasilkan output yang berkualitas pula (Yulianti dkk., 2021).

METODE

Metode yang digunakan dalam artikel ini ialah studi literatur. Adapun tujuan dasar dari studi literatur ialah untuk memperoleh data

semaksimal mungkin mengenai subjek atau permasalahan yang sedang diselidiki. Proses pengumpulan data maupun informasi diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti, ada berbagai proses yang terlibat dalam melakukan studi literatur, termasuk memilih topik, pengumpulan data, menetapkan tujuan penelitian, menyajikan data yang diperoleh, dan menarik kesimpulan.

HASIL

Ada beberapa permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan bimbingan dan konseling di sekolah di antaranya :

a. Perencanaan

Seringkali perencanaan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling terkesan seadanya dan kurang matang, kurangnya kemampuan dan kompetensi guru BK dalam penyusunan program seperti misalnya tidak jarang menggunakan program turunan dari tahun ke tahun sehingga kurang relevan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini.

Hal ini sejalan dengan penelitian Fitri dkk., (2019) menyebutkan ketidaksesuaian rasio guru bimbingan dan konseling dengan siswa serta keterampilan dan kompetensi yang kurang mumpuni dalam pembuatan program bimbingan konseling menjadi alasan mengapa guru bimbingan konseling di SMPN 277 Jakarta dan SMPN 283 Jakarta mengalami kesulitan dalam membuat program bimbingan konseling.

b. Pengorganisasian

Distribusi beban kerja yang kurang merata, pertimbangan pembagian beban kerja, alur organisasi yang kurang jelas, hubungan dengan stakeholder yang kurang baik, kurangnya penyiapan sarana dan prasarana yang mendukung terlaksananya program, penyiapan sistem administrasi dan tata layanan juga menjadi permasalahan dalam pengorganisasian.

Dalam penelitian Moyer (2011) Wilkerson & Bellini (2006) menyebutkan bahwa banyak guru BK tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai tugas utama mereka, dibebani oleh tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekolah selain memberikan layanan BK, dan terlibat dalam kegiatan pengembangan profesi yang tidak tepat.

c. Pelaksanaan

Pada bagian ini yang sering menjadi kendala ialah bagaimana implementasi dari perencanaan pada tahap sebelumnya benar-benar terlaksana, kurangnya kesesuaian penggunaan metode dan teknik dalam pelaksanaan program dengan perencanaan, kurangnya kerja sama yang kolaboratif dengan pihak-pihak terkait yang mendukung terlaksananya program BK.

Hal ini sejalan dengan yang di paparkan oleh Nugroho dkk., (2021) Pelaksanaan program ini terhambat dikarenakan beberapa hal yaitu guru BK tidak mendapatkan jam mengajar yang memadai, tidak adanya kerja sama dengan

pihak sekolah, kurangnya sosialisasi bimbingan dan konseling oleh guru BK kepada siswa, masih adanya persepsi negatif terhadap guru BK di kalangan siswa, dan fasilitas layanan bimbingan dan konseling di sekolah yang belum dioptimalkan secara maksimal.

d. Pengawasan/Penilaian

Kurangnya pengawasan secara berkala untuk memantau terlaksana atau tidaknya program BK, bagaimana kualitas dari keterlaksanaan program tersebut, apa kendala yang dihadapi, dan standarisasi dari kualitas layanan yang tidak menentu menjadi alasan kurangnya perencanaan yang lebih efektif dan efisien dimasa mendatang.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Farozin dkk., (2017) diketahui bahwa beberapa aspek yang menjadi permasalahan ialah kurang terampilnya guru BK dalam membuat rancangan evaluasi program BK, kurang terampil dalam membuat pelaporan perancangan program BK, kurang terampil dalam membuat rancangan evaluasi program BK, kurang terampil menggunakan *software* analisis instrumen evaluasi program BK, bahkan dari segi kepemilikan, tidak sedikit guru BK tidak memiliki *software* analisis instrumen evaluasi program, selain itu instrumen evaluasi program BK dalam keadaan kurang baik.

e. Tindak Lanjut

Ketika suatu program dan kegiatan telah terlaksana dan telah dilakukan pula pengawasan dan penilaian tak jarang juga

hasil-hasil dari evaluasi dan penilaian tersebut tidak dilakukan tindak lanjut dan tetap terpaku pada program yang sudah ada saja, sehingga tidak disusunnya program dan perencanaan yang lebih efektif, efisien, tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan yang telah dikaji sebelumnya.

Hanya 18,75% guru BK yang secara konsisten melakukan evaluasi, menurut penelitian Rachmalia (dalam Badrujaman, 2011). Meskipun begitu masih banyak pula guru BK yang melakukan evaluasi yang tidak terstandar. Hal ini tentu saja berdampak pada bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi tersebut, keterampilan guru BK dalam mengevaluasi program dan tidak adanya standar dari instrumen evaluasi itu sendiri. Sejalan dengan penelitian (Farozin dkk., 2017) bahwa sebanyak 26,09% kurang dan tidak memenuhi syarat untuk merumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan pengembangan program bimbingan dan konseling selanjutnya.

PEMBAHASAN

Sebagaimana untuk proses pembelajaran lainnya, seperti pembelajaran yang diselenggarakan guru mata pelajaran, proses konseling oleh konselor menggunakan pola pengelolaan POAC-Plus : P (*Planning*) yaitu perencanaan, O (*Organizing*) yaitu pengorganisasian/pengaturan, A (*Actuating*) yaitu pelaksanaan, C (*Controlling*) yaitu

pengendalian/penilaian, dan Plus yaitu tindak lanjut : laporan lengkap (Prayitno, 2018).

Perencanaan adalah proses pengorganisasian seluruh atau sebagian kegiatan pelayanan. Melalui perencanaan, berbagai rencana pelaksanaan diorganisasikan (disusun) secara cermat dan rapi. Dengan terorganisirnya semua sarana dan prasarana yang diperlukan, sedapat mungkin telah siap pakai dan siap pakai. Penilaian (*controlling*) terhadap proses pelaksanaan kegiatan pelayanan, khususnya hasil-hasilnya, dilakukan. Pelaksanaan manajemen meliputi penilaian dalam arti terbatas, pengembangan dan pembinaan dalam arti luas, serta tindak lanjut (Prayitno, 2021).

1. *Planning* (Perencanaan)

Dalam layanan konseling, perencanaan merupakan hal yang krusial. pelaksanaan layanan konseling melalui berbagai kegiatan dan program bimbingan di sekolah Neviyarni (2023) sangat penting untuk menentukan tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan rencana BK.

Kepala sekolah, koordinator BK, dan guru BK bertanggung jawab melakukan perencanaan diantaranya mempersiapkan dan menetapkan tujuan, sasaran, materi, teknik, waktu, tempat, dan rencana evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, konselor melakukan perencanaan (Rachmawati, 2013). Melalui program layanan, perencanaan dilakukan dalam layanan BK. Program layanan BK dibagi

menjadi komponen tahunan, semesteran, bulanan, mingguan, dan harian. Program harian yang meliputi program layanan dan program kegiatan pendukung merupakan salah satu bentuk manajemen bimbingan dan konseling yang dipraktikkan.

Kegiatan perencanaan terdiri dari (1) identifikasi kebutuhan siswa (masalah yang dihadapi, tantangan kedepannya, dan pengembangan yang dibutuhkan), (2) identifikasi kondisi sekolah (melalui analisis SWOT secara mendalam yang berpengaruh dalam pelayanan BK), (3) perumusan dan penetapan tujuan (sesuai dengan tujuan sekolah, tujuan BK, dan kebutuhan peserta didik yang tentu saja konkret, spesifik, dan *observable*). (5) penentuan jenis, teknik, dan strategi kegiatan (6) penentuan waktu dan tempat kegiatan, dan (7) penentuan sarana dan prasarana serta anggaran biaya yang dibutuhkan, 8) menetapkan indikator keberhasilan dan mekanisme evaluasi

2. *Organizing*

(Pengorganisasian/Pengaturan)

Menentukan sumber daya dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, merancang dan mengembangkan organisasi atau kelompok kerja yang dapat menyatukan hal-hal tersebut, menetapkan tanggung jawab yang spesifik, dan memberikan wewenang yang diperlukan kepada orang-orang untuk melaksanakan tugas-tugas, semuanya merupakan bagian dari pengorganisasian (Handoko dalam Dewany dkk., 2022)

Setelah perencanaan selesai, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Pada

langkah ini, jenis pekerjaan, pembagian tugas, individu yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan, anggaran dana, dan ketersediaan fasilitas yang diperlukan diatur lebih lanjut. Tindakan mengatur, mengumpulkan, dan mengorganisir adalah salah satu jenis kegiatan pengorganisasian (Hifsy dkk., 2022).

Sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan dalam pemberian layanan serta pelaksanaan bimbingan dan konseling melalui kolaborasi internal dengan *stakeholder*, guru bimbingan dan konseling mengembangkan pengorganisasian bimbingan dan konseling. Diantara kegiatan *organizing* adalah sebagai berikut : (1) penetapan tugas dan tanggung jawab anggota tim bimbingan dan konseling sekolah (kelas bimbingan, penyusunan program, pengelolaan dokumentasi, kerja sama), (2) berkoordinasi dengan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan perencanaan dan pengorganisasian BK, (3) pembagian waktu dan ruang yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan (contoh jadwal konsultasi, konseling individual, dan lain-lain), (4) penyusunan sistem administrasi dan dokumentasi yang efisien, (5) penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Istilah "actuating" atau "gerakan aksi" mengacu pada tindakan yang diambil oleh manajemen untuk memulai dan melaksanakan tugas-tugas yang telah digariskan dalam perencanaan dan pengorganisasian untuk mencapai tujuan (Terry dalam Dewany dkk.,

2022). Setelah dilaksanakan perencanaan, dan dilakukan pengorganisasian dalam bentuk penyusunan personalianya maka langkah berikutnya ialah melaksanakan kegiatan tersebut.

Actuating merupakan pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan apa yang diperlukan dan dimaksudkan. Semua pihak yang terkait dilibatkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada maupun yang dibutuhkan. Kegiatan yang dilaksanakan ialah (1) implementasi program BK, (2) melakukan pendekatan secara responsif dan inklusif, (3) menggunakan metode dan teknik yang tepat sesuai dengan kebutuhan, (4) pemanfaatan sumber daya pendukung (sarana dan prasarana serta media), (5) melakukan kerja sama yang kolaboratif dengan berbagai pihak seperti, psikolog, petugas layanan kesehatan, ahli bidang pendidikan dan lainnya yang mendukung terlaksananya kegiatan BK.

4. Controlling (Pengawasan/Penilaian)

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, pengawasan (*controlling*) menjadi hal yang krusial dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Selain agar tidak terjadi penyimpangan tersebut, untuk mengetahui kualitas hasil pelaksanaan layanan BK maka perlu dimonitor dan dievaluasi.

Neviyarni (2023) memaparkan bahwa supervisi dilakukan oleh penanggung jawab dan supervisor di bidang BK, kemudian koordinator BK juga melakukan supervisi manajemen

administrasi yaitu 7M+1 I diantaranya : *Men* yaitu mengenai sumber daya manusia/personil, *Material* yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan, *Machines* yaitu peralatan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, *Method* yaitu metode/layanan yang akan dilaksanakan, *Money* yaitu anggaran dana dan sumber dana, *Market* yaitu pengguna layanan BK terutama peserta didik, *Minute* yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya, selain itu juga ditambah dengan *Information* yaitu informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengawasan.

Di antara kegiatan dalam *controlling* adalah (1) memantau pelaksanaan kegiatan, (2) mengumpulkan data dan informasi terkait dengan efektivitas dan efisiensi program, (3) mengadakan pertemuan rutin tim BK dalam pembahasan program terkait tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya serta kendala-kendala terkait, (4) menerapkan alat evaluasi seperti kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan BK, (5) penerapan indikator/kriteria keberhasilan.

5. Plus (Tindak Lanjut : Laporan Lengkap)

Pengelolaan layanan konseling dilaksanakan dengan mengaplikasikan POAC Plus. Plus merupakan tindak lanjut yang melibatkan kegiatan pembinaan dan pengembangan di samping meningkatkan implementasi untuk memberikan hasil yang lebih baik (Prayitno, 2021). Setelah pengawasan, tindak lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa layanan diberikan sesuai dengan yang direncanakan dan bertujuan untuk menerapkan hasil dari evaluasi (Marisa, 2020).

Hasil dari evaluasi dipantau untuk pelaksanaan tindak lanjut, karena tanpa tindak lanjut, penilaian terbaik sekalipun tidak akan ada artinya.

Kegiatan dalam tindak lanjut ialah : (1) mengidentifikasi kebutuhan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi (bagian mana yang perlu diperbaiki, dirubah, dan ditingkatkan) untuk pencapaian tujuan yang lebih efektif dan efisien, (2) perencanaan perbaikan (tindakan perbaikan yang spesifik dan terukur untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi dalam evaluasi), (3) implementasi tindakan perbaikan, (4) komunikasi dan pelaporan kepada pihak terkait tentang perubahan yang telah dilakukan, hasil yang dicapai dan langkah-langkah yang akan diambil, (4) pengembangan program dan kegiatan yang efektif dan efisien setelah evaluasi untuk meningkatkan hasil yang diinginkan, (5) peningkatan kompetensi profesional para staf BK agar senantiasa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang sesuai.

SIMPULAN

Tindakan mengorganisasikan seluruh sumber daya bimbingan dan konseling dalam upaya mencapai tujuan bimbingan dan konseling secara khusus serta tujuan pendidikan secara umum disebut sebagai manajemen bimbingan dan konseling. Dalam rangka membantu pencapaian tujuan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien, manajemen menjadi sangat penting. Kemampuan manajemen merupakan salah satu kemampuan

yang harus dimiliki oleh seorang konselor bimbingan dan konseling untuk menjalankan program bimbingan dan konseling yang sukses dan efektif. Untuk penyelenggaraan layanan yang matang, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuannya, POAC-Plus perlu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, khususnya unit layanan bimbingan dan konseling.

DAFTAR RUJUKAN

- Dewany, R., Firman, & Neviyarni. (2022). Penerapan Manajemen Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Belajar Siswa. *Education & Learning*, 2(2), 83–87.
- Farozin, M., Suwarjo, Bintani, K., Syarifah, A., & Arfalah, S. (2017). Identifikasi Permasalahan Perancangan Program Bimbingan dan Konseling Pada Guru SMK Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan*, 10(1), 40–52.
- Fitri, I. A. D., Hidayat, D. R., & Hartati, S. (2019). Manajemen Program Bimbingan Konseling Sekolah Menengah Pertama. *Counsellia: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(2), 103–114.
- Fitriyani, N., & Herdi. (2019). Gambaran Sistem Manajemen Dalam Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Bikotetik. Volume 03 Nomor 02 Tahun 2019*, 40-85, 3(2), 67–71.
- Hifsy, I., Firman, & Neviyarni. (2022). Implementasi Manajemen Bimbingan dan konseling (POAC) untuk Pelayanan Bimbingan Konseling yang Efektif. *Education & Learning*, 2(2), 74–78.
- Kementerian Pendidikan Nasional. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Republik Indonesia No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor, Pub. L. No. 27, 1 (2008). Republik Indonesia.

- Neviyarni. (2023). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: KENCANA. Meningkatkan Mutu Belajar Siswa. *Education & Learning*, 2(2), 83–87.
- Nugroho, D. A., Khasanah, D. N., Pangestuti, I. A. I., & Kholili, I. (2021). Problematika pelaksanaan bimbingan dan konseling di SMA: A systematic literature review (SLR). *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 5(1), 87–96.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 tahun 2014 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud § (2014). Republik Indonesia.
- Pratama, R. (2020). *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Prayitno. (2018). *Konseling Profesional Yang Berhasil. Layanan dan Kegiatan Pendukung*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Prayitno. (2021). *Landasan dan Arah Konseling Profesional : Konseling adalah Pendidikan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rachmawati, U. (2013, Februari). *Manajemen Bimbingan Dan Konseling Tanpa Alokasi Jam Pembelajaran Di SMA Negeri 3 Semarang Tahun Ajaran 2012/ 2013*. Universitas Negeri Semarang, Semarang
- Rahman, K. A., Muspawi, M., & Martini, T. (2018). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di SMA Negeri*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 15(1), 41–47.
- Syukur, Y., Neviyarni, & Zahri, T. N. (2019). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Malang: CV IDRH.
- Yulianti, A., Neviyarni, Syukur, Y., & Ahmad, R. (2021). *Implementasi Manajemen Pembelajaran Psikologi Pendidikan di Sekolah Tinggi Pekanbaru*. *Arsyad : Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 11(1), 22–30. Dewany, R., Firman, & Neviyarni. (2022). *Penerapan Manajemen Layanan Bimbingan Dan Konseling Dalam Upaya*